

ABSTRAK

Peraturan Daerah (Perda) bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga cerminan dari kebutuhan masyarakat lokal yang dinamis. Dalam upaya menciptakan kehidupan kota yang tertib dan berkeadaban, Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran hadir sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas lalu lintas dan kebutuhan ruang parkir. Di sisi lain, dalam tradisi hukum Islam, pendekatan *Maṣlaḥah mursalah* kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus namun sejalan dengan tujuan syariat dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan kebijakan publik kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perda tersebut mengandung prinsip-prinsip kemaslahatan yang universal, pasti, dan mencakup kepentingan kolektif masyarakat.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif, dengan menelaah pasal-pasal perda secara mendalam dan mengaitkannya dengan pemikiran para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Muhammad Abu Zahrah. Hasilnya menunjukkan bahwa perda ini tidak hanya memenuhi kategori *Maṣlaḥah dharuriyyah* seperti menjaga keselamatan jiwa melalui pelarangan parkir di tempat berbahaya tetapi juga mencakup *Maṣlaḥah hajiyyah* dan *tahsiniyyah* melalui jaminan asuransi kendaraan dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna jalan. Peraturan ini juga disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dan dilengkapi mekanisme sanksi serta pengawasan berkala, yang menjadikannya bentuk kemaslahatan yang terukur dan implementatif.

Dengan melihat keseluruhan isi dan spirit dari perda ini, dapat disimpulkan bahwa ia tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga kuat secara etis dalam bingkai maqashid syariah. Perda ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dalam ruang publik dan memberi kontribusi nyata bagi kehidupan perkotaan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Kajian ini memperlihatkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan kebijakan publik bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan kebutuhan yang semakin relevan di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci : Maṣlaḥah Mursalah, Perparkiran, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Regional Regulation (Perda) is not merely a legal rule, but also a reflection of the dynamic needs of local communities. In an effort to create an orderly and civilized urban life, the Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2018 on the Implementation of Parking was established as a response to the increasing complexity of traffic and the growing demand for parking space. On the other hand, within the tradition of Islamic law, the concept of *Maṣlaḥah Mursalah* a form of public interest that lacks specific textual evidence yet aligns with the objectives of the Sharia can serve as a bridge between Islamic values and the needs of contemporary public policy. This study aims to examine the extent to which the regulation incorporates universal, definitive, and collective principles of public interest (*maṣlaḥah*).

The research adopts a normative qualitative approach by deeply analyzing the articles of the regulation and linking them to the thoughts of classical and modern scholars such as Imam al-Ghazali and Muhammad Abu Zahrah. The findings reveal that this regulation not only meets the category of *Maṣlaḥah Dharuriyyah* (essential benefits), such as ensuring the safety of life by prohibiting parking in hazardous areas, but also encompasses *Maṣlaḥah Hajiyyah* (complementary needs) and *Tahsiniyyah* (embellishments), for instance through vehicle insurance guarantees and protection of pedestrians' rights. This regulation is formulated based on the actual needs of the community and is supported by sanction mechanisms and periodic monitoring, making it a measurable and implementable form of *maṣlaḥah*.

By reviewing the content and spirit of this regulation, it can be concluded that it is not only legally valid but also ethically sound within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. This regulation serves as evidence that Islamic values can coexist within the public sphere and make a tangible contribution to a more humane, just, and sustainable urban life. This study demonstrates that integrating Islamic law and public policy is not only possible but increasingly necessary amidst the dynamics of modern society.

Keywords: *Maṣlaḥah Mursalah*, Parking, Regional Regulation